

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kementerian Keuangan memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak masa kemerdekaan dan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno menunjuk Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pertama, menandai awal berdirinya organisasi tersebut. [6]



Gambar 2. 1. Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) merupakan sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian ini terletak di Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, Indonesia. Peran Kementerian Keuangan sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. [7]

Kementerian Keuangan dikepalai oleh seorang Menteri Keuangan yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia. Menteri Keuangan adalah anggota Kabinet Indonesia. [8] Kementerian Keuangan melaksanakan tugas-tugasnya melalui berbagai unit kerja, termasuk Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Selain itu, Kementerian ini menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, serta melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. [9]

2.1.1 Visi Misi

A. Visi

Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden.

B. Misi

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Kementerian Keuangan bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan negara dan kekayaan negara untuk mendukung Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara. Sebagai contoh, beberapa tugas yang diemban oleh Kementerian Keuangan antara lain:

1. Mengenai kebijakan terkait anggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko, termasuk proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaannya.
2. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan masih banyak lagi. [10]

Kementerian Keuangan juga memiliki beberapa instansi setingkat Eselon I di bawah, yaitu Sekretariat Jendral, Inspektorat Jendral, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Direktorat Jendral Anggaran, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal dan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Sebagian besar instansi Eselon I yang terkait dengan Kementerian Keuangan berlokasi di kantor pusat, namun ada beberapa instansi Eselon I yang terkait dengan Kementerian Keuangan yang memiliki lokasi di luar kantor pusat. Beberapa di antaranya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berlokasi di Jalan Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. [7]



Gambar 2. 2. Foto Lingkungan Gedung Kemenkeu

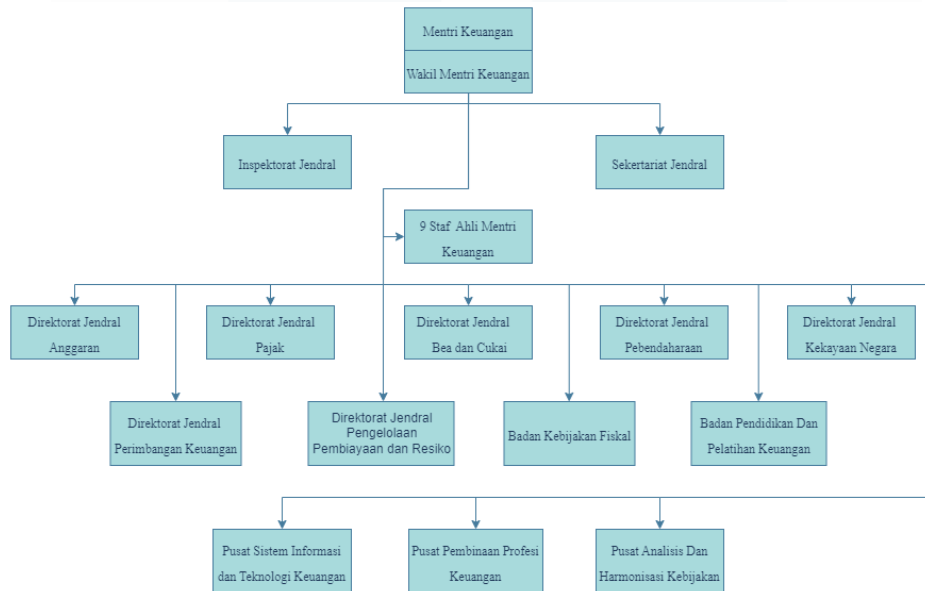
Melaksanakan kerja magang di salah satu unit di Kementerian keuangan yaitu *Central Transformation Office (CTO)* sebagai *data analyst*, CTO adalah sebuah unit atau bagian di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan program transformasi organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi kementerian.

Tujuan utama dari CTO adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, efektif, dan inovatif. CTO bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam sistem kerja kementerian, merancang strategi untuk memperbaiki sistem kerja tersebut, dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan transformasi tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, CTO bekerja sama dengan berbagai bagian dan unit di Kementerian Keuangan serta instansi terkait lainnya. CTO juga berperan sebagai pusat pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi bagi para pegawai di Kementerian Keuangan. [11]

Sebagai hasil dari transformasi yang dijalankan oleh CTO, diharapkan Kementerian Keuangan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam mengelola keuangan negara. Transformasi yang dilakukan oleh CTO juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di dalam sistem kerja Kementerian Keuangan. [11]

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

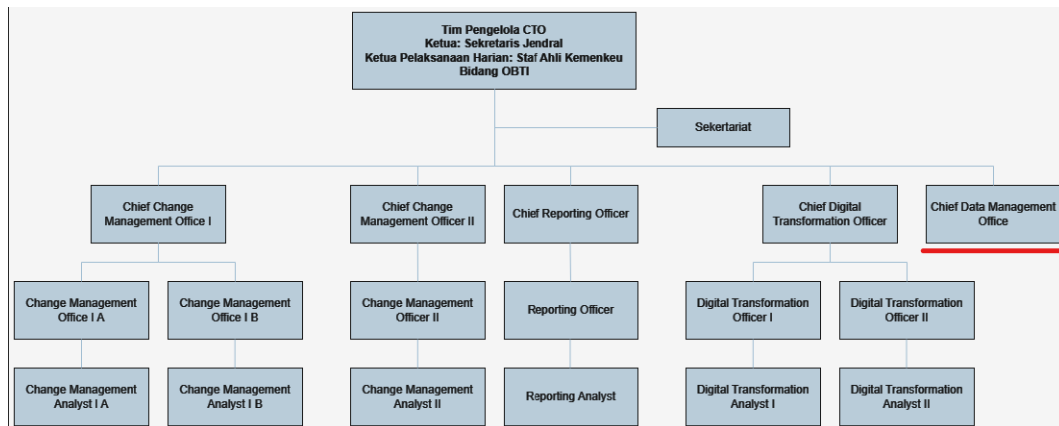
Struktur organisasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 3. Struktur Organisasi Kemenkeu RI

Pada Gambar 2.3 di atas merupakan struktur organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah salah satu kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Kemenkeu di pimpin oleh menteri keuangan dan wakil menteri keuangan, Kementerian ini memiliki tugas dan fungsi utama dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan keuangan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kemenkeu dibantu oleh beberapa unit organisasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut struktur organisasi *Central Transformation Office* (CTO) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 4. Struktur Organisasi Central Transformation Office (CTO)

Gambar 2.4 menunjukkan struktur organisasi CTO yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. CTO memiliki Ketua Pelaksana Harian yang merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. CTO terdiri dari 16 anggota, dan bagian yang terdapat garis merah di bawah merupakan tempat melaksanakan magang. Tugas CTO adalah mendukung dan mengoordinasikan implementasi Transformasi Kelembagaan (TK) di berbagai unit Eselon I, termasuk Sentral (Sekjen, Itjen, dan BPPK) DJP, DJBC, Penganggaran (DJA dan DJPK), serta unit-unit yang terkait dengan fungsi Perbendaharaan (DJPB, DJKN, dan DJPPR). [11]